

INTEGRASI KOMODITI DAN INSTITUSI; SEBUAH MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

Commodity and Institution Integration; A Model of Rural Economic Empowerment

Saifuddin^{1*}, Suadi², dan Fadli³

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh^{1,2}

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh³

*E-mail: saifuddinyunus@unimal.ac.id

ABSTRACT

In post-conflict, Aceh government has implemented various activities to empowerment people's economy in rural areas. Especially for ex-combatants of Free Aceh Movement and conflict-victims communities in East Aceh district, Aceh government has carried out some activities to empower their economic. It includes the provision of palm oil, cattle and goats assistance. This study aims to develop a model of community economic empowerment through the integration of commodities and institutions. This research used qualitative approach, which data were analyzed in three steps; data reduction, data display and conclusion. The results showed that the model of cattle-oil palm integration has not supported by integration of government and private institutions, so that empowerment program has not effect to raise their economic optimally.

Keywords: Integration, Empowerment, Cattle, Palm Oil and Institution

ABSTRAK

Pasca konflik, Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Khususnya untuk mantan Kombatant Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur, kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan adalah memberikan bantuan kelapa sawit, sapi dan kambing kepada mereka dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk lembaga swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui integrasi antar komoditi dan sekaligus institusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dalam tiga tahapan yaitu reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integrasi sawit-sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak di dukung oleh integrasi antar institusi. Akibatnya program pemberdayaan tidak memberi dampak terhadap peningkatan percepatan ekonomi masyarakat secara optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Integrasi, Sapi, Sawit dan Lembaga

PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu wilayah di Indonesia yang mengalami konflik dalam kurun waktu yang sangat lama. Konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi akibat dari proses interaksi disosiatif. Konflik menyebabkan hubungan antar pihak yang berkonflik menjadi renggang bahkan menjurus kepada perubahan perilaku yang menimbulkan tindakan kekerasan (Widardi, 2009). Sebagai sebuah tindakan sosial, konflik tentu berpengaruh kepada sistem pola hubungan dalam suatu masyarakat. Perseteruan antara para kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI dengan menggunakan senjata api mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan pola hubungan antar masyarakat di Aceh. Gambaran tindakan kekerasan yang terlihat setiap hari, membentuk jiwa masyarakat yang juga keras (Setiadi dan Kolip, 2011). Pengaruh yang paling besar dari kondisi tersebut yaitu terhadap masyarakat usia remaja dan anak-anak.

Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu wilayah basis dari konflik antara GAM dan Pemerintah RI di Propinsi Aceh. Oleh sebab itu, dampak konflik di wilayah ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya sangat besar. Pada saat konflik, masyarakat tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi dengan nyaman. Sebahagian besar masyarakat, umumnya para petani dan pekebun tidak dapat menggarap lahannya. Pada tahun 2002 masyarakat di aceh melakukan pengungsian, sebanyak 72 % pengungsi yang tinggal ditempat pengungsian adalah petani. Setelah dipindahkan mereka tidak dapat lagi mengolah lahan pertaniannya dan memanen tanaman karena situasi konflik

(saifuddin, 2014). Dalam kehidupan sosial, konflik juga telah merubah pola hidup masyarakat. Pada saat terjadi konflik, banyak masyarakat tidak saling percaya atau saling curiga-mencurigai satu sama lainnya, sehingga hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang sudah terbangun mengalami kehancuran (Setiadi dan Kolip, 2011).

Sebagai salah satu wilayah yang mengalami konflik besar dan relatif lama, tentu saja Pemerintah perlu melakukan tindakan yang komprehensif dan cepat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya mantan kombatant GAM dan masyarakat korban konflik. Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi-sosial masyarakat yang sudah rusak akibat konflik yang terjadi di Aceh, terutama setelah dilakukan penandatanganan MOU damai, pemerintah telah membuat berbagai macam program rehabilitasi. Salah satu program rehabilitasi pemerintah Propinsi Aceh terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Timur yaitu melalui pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi mantan kombatant Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan dari tahun 2006 sampai saat ini dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk bantuan tersebut yaitu berupa bantuan rumah, bantuan diat, bantuan untuk orang cacat, bantuan mukena dan *sajadah* kepada teungku (guru ngaji) dayah, pelatihan perbengkelan dan pemberian modal usaha, bantuan becak serta bantuan jaminan sosial. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi bantuan yang diberikan adalah pemberian bantuan karet, sapi, kambing dan kelapa sawit (Saifuddin *et al*, 2015).

Pembukaan areal sawit bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM di Kabupaten Aceh Timur ini dilakukan sejak tahun 2010. Penanaman sawit sebagian dilakukan pada lahan baru tetapi ada juga yang digunakan pada lahan yang ditinggalkan ketika konflik yang sebelumnya difungsikan untuk tanaman *polikultur*. Namun semua lahan ini baik lama maupun baru adalah merupakan lahan milik pribadi masyarakat, pemerintah hanya memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat (Saifuddin *et al*, 2015).

Mekanisme pemberian bantuan adalah dengan cara terlebih dahulu diusulkan masyarakat melalui kelompok masing-masing kepada pemerintah Aceh. Kemudian pemerintah Provinsi Aceh mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten (melalui dinas perkebunan dan kehutanan) untuk melakukan verifikasi ke lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut memiliki lahan. Dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten menunjuk seorang pengawas lapangan untuk berkoordinasi dengan ketua kelompok dalam usaha memastikan semua bantuan dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan (Saifuddin *et al*, 2015).

Proses pemberdayaan masyarakat melalui komoditi sawit yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur adalah berbasis *bottom up planning*. Ini sesuai dengan konsep pemberdayaan, bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan cara memposisikan mereka sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program. Pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

Program Bantuan Kelapa Sawit memiliki dampak positif pada perbaikan ekonomi lokal, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima dan masyarakat sekitar. Perkebunan kelapa sawit juga telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Peningkatan pendapatan juga mengakibatkan peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kejahatan melalui bantuan komoditas sawit dapat meminimalisir tumbuhnya jiwa separatisme pada masyarakat Aceh (Saifuddin *et al*, 2015).

Usahatani kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan yang semakin besar jika produksi kelapa sawit mampu ditingkatkan secara maksimal (Mawardati, 2010). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis berdasarkan perannya dalam mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat (Syahza, 2005). Pada masa yang akan datang, luas areal kelapa sawit diperkirakan terus mengalami peningkatan, karena tingginya animo masyarakat terhadap tanaman tersebut.

Pemberian bantuan kelapa sawit dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kehidupan sosial, namun jika pertumbuhan penanaman kelapa sawit yang tidak terkendali dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Erwin *et al* (2009) memaparkan bahwa kelapa sawit memiliki dampak sosial negatif, diantaranya terhadap keamanan pangan, perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan. Sementara dampak lingkungan yaitu terjadi perubahan bentang alam dan tata guna lahan, pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran kimia. Selanjutnya pembukaan lahan sawit juga dapat berdampak terhadap konflik sosial akibat persoalan hak atas tanah, sengketa tenaga kerja, ketidak harmonisan kemitraan, kriminalisasi penduduk desa dan skandal politik tingkat tinggi.

Banyaknya bantuan sawit untuk pemberdayaan masyarakat juga berdampak pada penggunaan lahan untuk sawit yang cenderung meluas. Ekspansi lahan untuk sawit yang berlebihan mengakibatkan pola penghasilan masyarakat cenderung homogen pada satu sumber yaitu kelapa sawit. Kondisi tersebut mengakibatkan kerentanan bagi masyarakat ketika harga kelapa sawit turun (Nursantri *et al*, 2016).

Model pelaksanaan pemberdayaan pemberian bantuan tersebut masih dilakukan secara parsial baik dari sisi komoditas maupun dari sisi kelembagaan (Saifuddin *et al*, 2017). Pemberian bantuan secara parsial dari sisi komoditas yaitu satu orang hanya diberi satu komoditas seperti ada orang yang hanya menerima bantuan tanaman kelapa sawit saja atau hanya menerima bantuan ternak sapi saja. Model pemberdayaan secara parsial dari sisi kelembagaan yaitu seperti Dinas Peternakan hanya memberikan bantuan sapi kepada orang tertentu dan Dinas Perkebunan member bantuan sawit kepada orang tertentu lainnya. Model pemberdayaan secara parsial, walaupun memiliki dampak positif terhadap perbaikan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Saifuddin *et al*, 2014), akan tetapi dampak yang diperoleh masih relatif kecil dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Walaupun model pemberdayaan secara parsial tersebut yang banyak dilakukan, namun ada juga masyarakat yang sudah melakukan secara integrasi, akan tetapi bentuk integrasi yaitu integrasi komoditi antara tanaman sawit dan sapi. Model integrasi perkebunan dan peternakan (Integrasi Komoditi) ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan model parsial (Handaka *et al*, 2009 dan Bangun, 2010). Model integrasi juga berpengaruh terhadap pencapaian target swasembada daging, terutama daging sapi. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengatakan bahwa swasembada daging sapi bisa dipercepat dengan konsep peternakan terintegrasi (Chairi, 2014). Di antara perkebunan yang paling mungkin dilakukan integrasi dengan peternakan adalah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet dengan ternak sapi atau kambing.

Selain integrasi komoditi, integrasi antar lembaga pelaksana yaitu antar satuan kerja di pemerintahan maupun antara satuan kerja pemerintahan dengan lembaga swasta yang berkompeten juga perlu dijalin dengan baik agar program pemberdayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi percepatan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, model pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dirumuskan model pemberdayaan yang lebih efektif yaitu model pemberdayaan melalui integrasi antar komoditi sekaligus antar lembaga. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengembangkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk integrasi komoditi dan juga lembaga.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat adalah melahirkan masyarakat yang mandiri melalui pengembangan potensi yang mereka miliki. Masing-masing wilayah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda yang apabila dimanfaatkan secara optimal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan. Dalam pemberdayaan, masyarakat memiliki peranan penting, karena masyarakat merupakan subyek dari pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun kekuatan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Sedangkan bidang pemberdayaan dapat berbagai macam, diantaranya yaitu bidang ekonomi yang dikenal dengan pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Konsep ini muncul sejak lahirnya revolusi industri. Di negara berkembang termasuk Indonesia konsep pemberdayaan lahir dikarenakan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi, degradasi sumberdaya alam dan lemahnya penguasaan faktor produksi oleh masyarakat dibandingkan dengan pengusaha. Hutomo (2009) dan Sumidiningrat (1999) menjelaskan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjalankan roda perekonomian nasional yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar oleh semua warga negara yang berakar pada potensi dan kekuatan mereka sendiri. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk mempengaruhi, berpartisipasi, mengendalikan, bernegosiasi dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat mempengaruhi perbaikan kehidupan mereka.

Kendala-kendala yang sering muncul dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kendala *struktural*, oleh karena itu, pemberdayaan harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang dilakukan untuk merubah keadaan atau kondisi masyarakat dari bentuk ekonomi yang tradisional menuju ke sistem ekonomi modern, dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang lebih kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Upaya-upaya untuk melakukan proses perubahan struktural tersebut adalah terdiri dari: 1) pengalokasian sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; dan 4) pemberdayaan sumberdaya manusia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi harus adanya kerjasama dan kemiteraan yang erat antara masyarakat yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang (Sumidiningrat, 1999).

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipahami secara lebih sederhana yaitu pemberdayaan yang ditujukan pada Penguatan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap faktor-faktor produksi. Oleh sebab itu pemberdayaan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus dijalankan berbarengan dengan pemberdayaan sosial, politik, dan bahkan psikologis. Sismudjito (2016) mengatakan bahwa salah satu model pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berbasis pada perkebunan adalah pemberdayaan sosial ekonomi melalui solidaritas atau kerjasama.

Konsep-konsep yang sudah dikemukakan tersebut seluruhnya menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat sebagai proses perubahan dari situasi yang kurang memiliki kemampuan sehingga lebih mampu untuk memperbaiki kehidupannya. Agar keadaan tersebut dapat dicapai dengan maksimal dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan untuk memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Banyak program parsial sektoral yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat. Pada umumnya program dan proyek yang digulirkan dalam bentuk bantuan fisik kepada masyarakat, baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Dalam kenyataannya, sebagian besar proyek tidak mencapai tujuan secara maksimal dan tidak berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut (Rahayu, 2006), antara lain: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan; (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung; (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana; (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan proyek.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bahrein (2010) dimana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara parsial sektoral dengan membentuk kelembagaan baru. Kelembagaan baru ini bersifat "*top down*", sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan umumnya keberlanjutan kelembagaan baru tersebut sangat rendah. Desa dan masyarakat diposisikan sebagai obyek pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Hal ini menjadi penyebab tumbuhnya perasaan apatis masyarakat desa karena dianggap kurang kompeten untuk mengelola desanya sendiri.

Integrasi Sawit-Sapi sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian komoditi sawit di Aceh, termasuk di kabupaten Aceh Timur, tentu akan membantu dalam pemulihan ekonomi, sosial dan keamanan di Aceh. Tanaman sawit merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan proses dan waktu untuk menghasilkan output, sehingga berimbas pada penghasilan masyarakat penerimanya. Lamanya waktu antara penanaman dan penerimaan hasil, membuat para petani (masyarakat penerima bantuan) kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya pada saat tersebut. Kondisi demikian menuntut untuk dilakukan terobosan, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem pemberdayaan dari yang parsial ke sistem integrasi yaitu ternak dan tanaman. Pola integrasi tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi usaha untuk meningkatkan pendapatan petani melalui usaha multikomoditas (ternak dan tanaman), bahkan multi institusi.

Model integrasi dapat menekan penggunaan *input* dan menjaga kelestarian sumber daya (Diwyanto dan Handiwirawan, 2004). Pola integrasi ternak ruminansia dan perkebunan kelapa sawit di beberapa provinsi di Indonesia mempunyai dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. sistem integrasi tanaman-ternak adalah satu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam satu kegiatan usaha tani (Handaka *et al*, 2009). Model integrasi sawit-sapi dapat dilakukan dengan sistem pemeliharaan intensif, semi intensif dan ekstensif. Semua sistem pemeliharaan tersebut mampu meningkatkan produktivitas sawit dan populasi sapi. Model tersebut memberikan tambahan penghasilan dari sapi dan penjualan TBS melalui pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan mengurangi jumlah tenaga kerja (Matondang dan Ctalib, 2015).

Pola integrasi sawit-ternak sebagai hubungan atau interaksi antara komponen industri sawit dengan komponen usaha peternakan, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani. Keberadaan ternak terutama sapi di kawasan perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pengangkut buah sawit (TBS), sementara kotoran yang dihasilkan ternak dapat

digunakan sebagai sumber pupuk organik yang dapat menambah kesuburan dan memperbaiki tekstur dan struktur tanah di kebun (Soejana, 2008; Gabdo & Abdlatif, 2013; Handaka et al, 2009 dan Diwyanto et al. 2004).

Chaniago (2009) melaporkan bahwa keuntungan integrasi sapi dengan kelapa sawit adalah terjadinya penambahan jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO). Pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran sapi akan menghemat biaya terutama untuk biaya pembuatan kolam limbah pabrik kelapa sawit dan biaya pemberian pupuk. Sapi yang dipelihara dalam kebun sawit dapat digunakan untuk mengangkut TBS ke Mobil pengangkut, sehingga hal ini dapat menghemat biaya pengangkutan TBS dalam kebun. Integrasi sapi dalam perkebunan sawit juga akan menghemat biaya pembuatan dan pemeliharaan jalan. Pertambahan bobot hidup sapi dengan biaya murah juga terjadi, karena limbah yang dihasilkan sawit menjadi sumber pakan murah bagi ternak sapi.

Selanjutnya program integrasi sawit sapi juga dapat menjaga kebersihan lingkungan. Integrasi sapi-kelapa sawit berpotensi menjadi usaha yang bagus terutama saat situasi ekonomi yang kurang stabil, tingkat pertukaran nilai uang rupiah yang masih rendah (Latif dan Mamat, 2002 dan Manti *et al.*, 2004).

Dirjen Peternakan (2009) menguraikan secara garis besar integrasi terkait dengan sistem produksi ternak dibagi menjadi dua sistem yaitu : 1) Sistem produksi berbasis ternak (*solely livestock production system*) yakni sekitar 90 persen bahan pakan dihasilkan dari *on-farm*-nya, sedangkan penghasil kegiatan non peternakan kurang dari 10 persen, 2) Sistem campuran (*mix farming system*) yaitu ternak memanfaatkan pakan dari hasil sisa tanaman.

Sistem integrasi tanaman dan ternak (*usaha sapi, sawit dan karet*) merupakan salah satu sistem produksi pertanian terpadu yang sangat berhasil di Malaysia. Sistem produksi terpadu ini dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan industri ternak, sistem penggunaan lahan yang efisien dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional. (Ismail dan Wahab, 2014). Dari sisi analisis finansial, pola integrasi kelapa sawit dan sapi sangat layak dilakukan (Rengi *et al.*, 2017).

Proses integrasi sawit dan sapi yang dilakukan di Aceh Timur merupakan proses integrasi secara alami, artinya tidak punya pengetahuan atau bimbingan dari para pihak mengenai integrasi sawit dan sapi tersebut. Walaupun proses ini terjadi secara alami, proses ini sudah dilakukan sejak tahun 2010. Pola integrasi yang dilakukannya yaitu dengan memanfaatkan rumput yang ada di sekitar kebunnya, namun ketika tidak sedang musim tanam padi, sapi dilepas ke areal persawahan. Proses integrasi sawit dan sapi yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan atas dasar keterpaksaan karena telah berkurangnya lahan akibat penanaman sawit yang semakin luas.

Proses integrasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur selama ini berbeda dengan integrasi yang sudah pernah dilakukan ditempat atau lembaga lainnya. Integrasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit misalnya dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, yaitu intensif, ekstensif dan transportatif. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Iwantoro, 2014) menjelaskan bahwa tujuan perusahaan melakukan integrasi sapi-sawit yang intensif adalah untuk mendapatkan pupuk organik, sehingga pemeliharaan sapi dilakukan secara intensif di kandang. Pada integrasi ekstensif, sapi difungsikan untuk pemakan gulma/rumput yang tumbuh di kebun sawit dan diberi tambahan pakan penguat/konsentrat dan

air minum. Integrasi transportatif yaitu integrasi dengan tujuan memanfaatkan tenaga kerja sapi untuk pengangkut sawit karena terjadi kekurangan tenaga kerja di lingkungan kebun sawit.

Bentuk integrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh Timur juga dengan cara menjalin kerjasama antar petani sawit dan antara peternak dengan petani sawit. Model kerjasama tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan sapi ke dalam sawit secara bebas tanpa arongan dan dengan cara arongan di dalam areal sawit. Model lainnya adalah kerjasama antara petani sawit yang tidak memiliki ternak dan peternak tidak yang memiliki areal sawit. Model integrasi seperti tersebut bertujuan; bagi pemilik sapi tidak perlu memikirkan lahan untuk melepaskan sapi mereka, sedangkan bagi pemilik sawit tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan rumput di dalam kebun sawitnya. Model integrasi ini tentu akan saling menguntungkan.

Pelaksanaan sistem integrasi sapi dan sawit di Aceh Timur baru sebatas integrasi komoditas, belum dilakukan integrasi antar lembaga pemerintah, misalnya antara Dinas peternakan dan perkebunan. Kedua lembaga pemerintah tersebut dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat masih membuat program sendiri-sendiri secara terpisah. Akibatnya bantuan bidang peternakan seperti sapi tidak dapat diintegrasikan dengan bantuan sawit dari dinas perkebunan, kecuali jika secara kebetulan masyarakat yang menerima bantuan peternakan juga memperoleh bantuan sawit.

Menurut Max Weber (dalam Ritzer, 2004) individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat (Sarwono, 2004). Jika teori Max Weber ini dikaitkan dengan perilaku masyarakat di lokasi kajian, maka dikatakan bahwa petani bertindak melakukan integrasi sawit dan sapi, berdasarkan atas pengalaman melihat orang lain yang telah sukses dengan cara tersebut.

Pelaksanaan integrasi sawit dan sapi di Wilayah Kabupaten Aceh Timur, tidak berdasarkan atas pemahaman (pengetahuan yang memadai). Situasi ekonomi yang kurang baik telah melahirkan stimulus yang kuat untuk melakukan sebuah aksi yaitu mengintegrasikan sapi ke dalam kebun sawit. Oleh karena itu secara sosiologis dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Aceh Timur sejalan dengan teori aksi yang dikemukakan oleh Max Weber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program bantuan sawit untuk pemberdayaan mantan kombatan GAM dan Masyarakat korban konflik. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan juga data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui; (1) wawancara mendalam dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada nara sumber dan informan yaitu pegawai dinas/instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Aceh Timur yang terlibat dan berperan dalam Pemberdayaan dan pemberian bantuan, tokoh masyarakat, pegawai perusahaan swasta; (2) *focus group discussion* dengan Kelompok penerima bantuan yaitu mantan GAM dan masyarakat korban konflik; (3) observasi non partisipan, dan (3) studi dokumentasi seperti bulletin, laporan tahunan, jurnal, majalah, koran, foto, dan catatan/laporan/arsip.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Analisis dilakukan melalui tahapan; Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan, pemilahan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan maupun dari studi literatur. Penyajian data, menyajikan dalam bentuk tabel dan narasi berdasarkan kelompok permasalahan dan tema penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari makna, membuat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Setiap tahapan dilakukan secara cermat dan sistematis dengan cara verifikasi, memeriksa kembali catatan lapangan, sehingga data-data yang ada dapat teruji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Aceh melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dalam bentuk pemberian bantuan sawit. Bantuan sawit diberikan kepada masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Hingga tahun 2014 total bantuan sawit yang telah diberikan mencapai 3.726 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Bantuan sawit diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah dibuat. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa bibit sawit, biaya pembersihan lahan, biaya penanaman, untuk pembelian pupuk, alat dodos dan kereta sorong (*grek angkut*). Jumlah kelompok yang menerima bantuan tersebut sebanyak 210 kelompok, dan melibatkan 3.408 orang mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik.

Program bantuan sawit tersebut telah membantu masyarakat (mantan kombatan GAM dan korban konflik) untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Selain itu bantuan sawit juga membantu masyarakat lain yang tidak menerima bantuan terutama para pemuda yang bekerja pada lahan sawit bantuan untuk pemanenan. Walaupun pendapatan yang diterima masih dirasa kurang, namun kondisi tersebut sudah dapat membantu mereka dalam memenuhi keperluan sehari-harinya. Salah satu informan yaitu bapak Hasbi (ayek) mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya program bantuan sawit dari Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi perekonomian mantan kombatan dan korban konflik sangat terbantuan. Kondisi sawit kami sudah masuk tahap produksi dengan jumlah 2,5 ton perhektar per 15 hari. Penghasilan dari kelapa sawit perbulan rata-rata perhektar mencapai Rp.1.000.000.-. Dan para pemuda dan masyarakat sekitar juga memperoleh pendapatan perhari dari bekerja sebagai pendodos dan pengangkut sawit sebesar Rp.200.000,- per hari perorang” (wawancara, 28 Juli 2017).

Walaupun pemberian bantuan sawit dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat, juga masih terdapat permasalahan yang dialami masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Aceh Timur diantaranya yaitu tidak ada penerimaan atau penghasilan yang mereka dapat pada masa awal pelaksanaan program (tahap persiapan penanaman) sampai memperoleh hasil perdana (panen pertama). Kondisi tersebut memaksa sebahagian besar penerima bantuan untuk bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus kebun yang diberikan kepada mereka, bahkan ada yang menjualnya.

Hal lain yang juga paling sering mereka alami adalah rendahnya harga jual sawit pada masa-masa tertentu atau terjadi fluktuasi harga jual juga yang sangat tinggi. Pada saat harga jual sawit rendah (murah), pendapatan masyarakat penerima bantuan sawit

khususnya akan menurun. Pada kondisi tersebut masyarakat sulit mengembangkan usahanya. Masyarakat para penerima bantuan sawit di Kabupaten Aceh Timur juga mengungkapkan bahwa mereka tidak punya akses terhadap harga pasar, sehingga sangat mudah bagi pengumpul untuk menetapkan harga belinya yang jauh dari harga pasar. Kondisi seperti itu juga yang sering dialami oleh masyarakat di berbagai wilayah, sebagaimana berita yang dimuat dalam harian Serambi Indonesia yaitu;

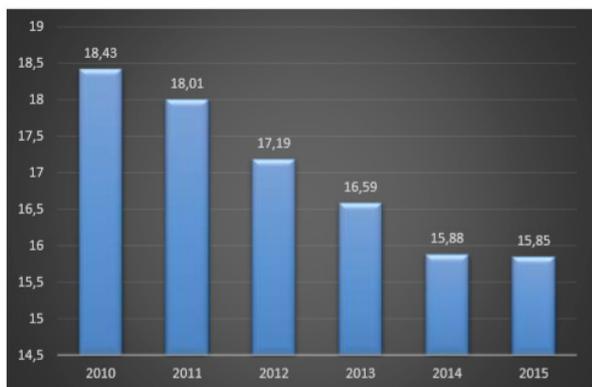
Kasus anjlok harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani di kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, Kabupaten Abdy sepekan terakhir diduga adanya indikasi permainan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan memanfaatkan banjirnya TBS pasca lebaran. Penilaian ini diungkapkan beberapa petani termasuk pedagang pengumpul. Petani menduga turun drastis harga TBS sawit belakangan ini diduga karena spekulasi pengusaha PKS dengan memanfaatkan banjir TBS sawit setelah lebaran Idul Fitri. Harga ditingkat pedagang pengumpul Rp.850 per kg, padahal sepekan sebelum lebaran harga jualnya Rp.1.200 – Rp.1.250 per kg. Bila harga TBS sawit ditingkat petani di bawah Rp.1.000 per kg akan merugikan petani karena harus mengeluarkan ongkos produksi serta biaya perawatan kebun (Serambi Indonesia, 10 Juli 2017). Pengusaha Perkebunan Kelapa sawit yaitu bapak Syahrul Miswar meminta Pemerintah Aceh segera menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ permentan/ OT.140/2/ 2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permainan harga di tingkat pabrik, sebab pemerintah daerah punya kewenangan untuk menentukan harga TBS sesuai permentan tersebut. Selama ini petani perkebunan kelapa sawit sangat mengeluh dengan harga TBS yang turun drastis khususnya di pantai barat selatan (Serambi Indonesia, 10 Juli 2017).

Oleh karena itu, sistem pemberdayaan dengan memberikan bantuan komoditi tertentu kepada masyarakat masih terdapat beberapa kelemahan. Pemberdayaan ekonomi dengan sistem pengintegrasian komoditi dalam hal ini model integrasi komoditi sawit dan sapi menjadi solusi yang mungkin diterapkan. Model ini dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup masyarakat selama mereka menunggu hasil tanaman sawitnya bisa dipanen. Model ini juga dapat mempercepat kemandirian masyarakat sebagai tujuan dari program pemberdayaan. Dengan sistem integrasi lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integrasi komoditi (sawit-sapi) memberikan tambahan pendapatan masyarakat penerima bantuan lebih besar dibandingkan model spasial yaitu hanya menanam sawitnya saja. Persepsi para penerima bantuan sawit dari pemerintah yang sudah melakukan integrasi dengan sapi di Kabupaten Aceh Timur yaitu:

Saifuddin, Kades Alue Siwah Serdang (informan) menyebutkan bahwa peningkatan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat dari integrasi sawit dan sapi jelas ada, hitungan sederhana adalah sapi yang dibeli dengan harga Rp.5.000.000,-, dalam waktu enam bulan bisa dijual dengan harga Rp.11.000.000,-. Ini artinya keuntungan perbulan mencapai Rp.1.000.000,- perekor.

Dalam satu lokasi sawit yang dapat dilepas sapi sebanyak 40 ekor, penghasilan keseluruhan sebesar Rp.240.000.000,-, jika dibagi 6 kelompok, maka perkelompok penghasilannya sebesar Rp.40.000.000,-, jika perkelompok terdapat empat orang, maka perorang dapat keuntungan Rp.10.000.000,- jadi perbulan petani tersebut mempunyai keuntungan dari sapi Rp.1.666.666,-. Selain itu masyarakat juga dapat melaksanakan pekerjaan lain seperti menanam cabe dan jahe, kedua komoditi ini juga akan menambah penghasilan. Jadi program integrasi sawit dan sapi ini sangat menguntungkan baik secara ekonomi, sosial dan dari segi efisiensi waktu. Menurut informan Sutimin, pendapatan yang dapat diperoleh dari model integrasi sawit dan sapi perbulan/hektar adalah Rp. 3.600.000,- jika sapi dikandangkan Dan diberi pakan pada malam hari, namun jika sapi dilepas bebas dalam sawit tanpa pakan pada malam hari, Pendapatan petani dari integrasi sawit dan sapi perbulan/hektar/sapi hanya mencapai Rp. 2.600.000,- (wawancara, 29 Juli 2017).

Disamping bantuan sawit, sejak tahun 2011 pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga sudah memberikan bantuan ternak sapi kepada sejumlah kelompok masyarakat melalui Dinas Peternakan. Melalui bantuan tersebut pemerintah berharap perekonomian masyarakat semakin baik sehingga kesejahteraan semakin meningkat dan kemiskinan semakin menurun. Tingkat kemiskinan di Aceh Timur dalam lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 1: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Aceh Timur dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan adanya korelasi antara program pemberdayaan masyarakat dengan kondisi Aceh Timur saat ini. Turunnya angka kemiskinan tersebut walaupun tidak sepenuhnya bisa dipastikan disebabkan oleh faktor bantuan pemerintah kepada masyarakat, namun kenyataannya penurunan tersebut terjadi setelah program bantuan sawit dan sapi dilaksanakan. Oleh karena itu, program bantuan pemerintah sudah relatif berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun ada program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan sapi oleh pemerintah kepada masyarakat di Aceh Timur, namun bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang bukan penerima bantuan sawit. Bantuan sapi diberikan kepada kelompok penerima lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kriteria yang mereka buat. Model integrasi sawit-

sapi yang ada di wilayah ini terbentuk dari inisiatif penerima bantuan sawit. Integrasi sawit sapi terjadi secara alami atau tanpa arahan atau program dari pemerintah. Kelemahan dari model pemberdayaan yang dilakukan secara parsial (masing-masing komoditi diberikan kepada masing-masing orang yang berbeda) yaitu lambatnya mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan integrasi ternak (sapi) dengan tanaman (sawit) perlu dukungan dari berbagai pihak terkait. Pola kemitraan antara inti (perusahaan perkebunan) dan plasma (peternak rakyat) bisa menjadi salah satu solusinya. Sudarya (2007) menyatakan bahwa untuk terwujudnya pembangunan integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit perlu dukungan dan kemitraan dari berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, pusat, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berbagai pihak dimaksud antara lain yang berminat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Riyanto (2007) mengatakan untuk lebih menciptakan prospek integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit dapat berhasil dan berkelanjutan, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, Aspek-aspek dimaksud antara lain : 1) ada keinginan yang kuat dari petani-peternaknya itu sendiri, 2) harus ada dukungan *political will* yang kuat dan konsisten, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam hal pendanaan, 3) mampu menggerakkan SDM peternakan di lapang dalam pendampingan petani-peternak dengan prinsip partisipatif, 4) dukungan biaya operasional yang memadai, 5) diperlukan need assessment petani-peternak sehingga program pendampingan berjalan baik, dan 6) diperlukan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan petani-peternak atau pekebun (pola kemitraan tradisional, pola kemitraan pemerintah dan pola kemitraan pasar).

Integrasi dinilai bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah pedesaan. Manfaat yang dirasakan dari model integrasi adalah, antara lain, membuat perencanaan pembangunan makin tertib, penganggaran menjadi lebih pasti, terhindar dari ketumpang-tindihan, dan meningkatkan akuntabilitas program reguler (Syukri et al, 2014). Strategi pengembangan usaha sektor pertanian (agribisnis) yang dilakukan melalui pola kemitraan (*partnership*) yang mengintegrasikannya dengan perusahaan besar atau dengan kelembagaan sosial dan ekonomi lainnya memberikan keadaan yang kondusif bagi petani untuk dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya (Ninuk Purnaningsih, 2008)

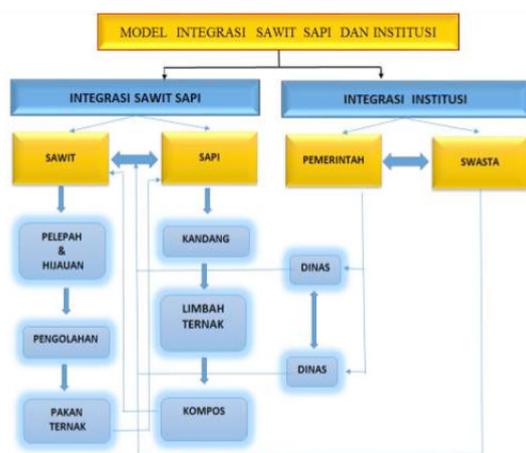
Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan model integrasi sawit dan sapi dalam pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi sama-sama harus mendukungnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Keempat unsur tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang baik. Masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan dari pemerintah akan berdaya jika pihak swasta melaksanakan bisnisnya dalam masyarakat sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut dapat bersinergi dengan akademisi dalam konsep dan gagasan. Pemerintah juga dapat mengawal pihak swasta agar meraka mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika semua unsur ini berjalan dengan baik maka petani akan berdaya sebagaimana tujuan dari pemberdayaan.

Di Kabupaten Aceh Timur model integrasi atau sinergitas antar komoditi maupun lembaga yaitu antar lembaga pemerintah (antar Dinas) dan antar lembaga pemerintah dengan lembaga swasta belum terjalin terutama dalam program pemberdayaan masyarakatnya. Dalam kegiatan pemberian bantuan sawit misalnya, pemerintah tidak mau bekerja sama dengan pihak swasta seperti pihak PTPN yang ada di wilayah Aceh Timur dan

sekitarnya. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, jika pihak PTPN misalnya memiliki program pemberdayaan kepada masyarakat tidak berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah (Dinas).

Syamsuar, (informan dari PTPN Langsa) menjelaskan bahwa Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak PTPN tidak bersinergi secara langsung dengan pemerintah daerah terutama dalam bentuk dan jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan, pihak PTPN juga mengakui bahwa pemerintah juga dalam melakukan pemberdayaan terutama terkait dengan bantuan sawit kepada masyarakat tidak pernah meminta atau melibatkan pihak PTPN. Akan tetapi jika pihak pemerintah daerah meminta kepada PTPN mereka siap membantu. Koordinasi dengan pemerintah daerah sudah terjadi dengan sendirinya melalui legalitas koperasi yang dibentuk masyarakat. Walaupun koordiansi secara formal dengan pemerintah tidak dilakukan. Model pemberdayaan masyarakat melalui bantuan lunak ini pernah kita tawarkan kepada pemerintah namun pemerintah tidak menerapkannya. Pemerintah lebih suka memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tanpa ada satu kewajiban untuk mengembalikannya modal kepada pemerintah. Pada sisi lain bantuan pemerintah yang diberikan juga tidak sampai pada tahap berproduksi (wawancara, 28 Juli 2017).

Beranjak dari kondisi tersebut, maka untuk mempercepat kemandirian masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perlu model yang komprehensif yang mengintegrasikan komoditi sekaligus lembaga. Melihat pada kondisi dan realita masyarakat model pemberdayaan melalui integrasi komoditi dan lembaga perlu diimplementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Model integrasi yang dimaksud tersaji dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Integrasi Sawit-Sapi-Pemerintah-Swasta

Model ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Integrasi komoditi (sawit-sapi) saja yang berjalan di Kabupaten Aceh Timur telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial keagamaan. Integrasi sawit sapi bukan sebatas integrasi antar komoditas tetapi juga terjadi integrasi antar petani dan peternak sehingga solidaritas dan kerja sama masyarakat dapat terjalin yang mengakibatkan integrasi sosial menguat. Integrasi petani dan

peternak juga telah memberi dampak positif dari segi efisiensi waktu kepada masyarakat sehingga dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan yang merupakan satu tradisi budaya dalam masyarakat tersebut. Pada akhirnya model integrasi ini tidak saja bagian dari pembangunan perdamaian pasca konflik tetapi juga dapat menumbuhkan nilai-nilai perdamaian pada masyarakat itu sendiri.

Jika model integrasi sawit dan sapi dapat berjalan secara baik, sebetulnya terdapat delapan keuntungan bagi petani/peternak di pedesaan, yaitu diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, mengurangi resiko usaha karena faktor produksi, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan input produksi atau mengurangi biaya produksi, mengurangi ketergantungan energi kimia dan dan biologi serta sumber masukaan lainnya.

Model integrasi komoditi dan lembaga merupakan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada satu sasaran objek. Mekanisme pemberian bantuan dalam model ini yaitu dengan cara menetapkan satu objek atau sasaran yang akan menerima satu atau lebih komoditi. Misalnya objek atau sasaran yang akan menerima bantuan sawit dari satu lembaga pemerintahan daerah (Dinas Perkebunan), kemudian sasaran tersebut juga akan diberikan bantuan komoditi sapi dari Dinas Peternakan pada periode atau tahun berikutnya. Untuk dapat melaksanakan program tersebut tentu perlu sinergi antar lembaga pemerintahan dalam menyusun program perencanaannya.

Kemudian jika sasaran atau objek pemberdayaan (orang yang akan menerima bantuan) perlu bimbingan teknis, maka lembaga pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga swasta yang terkait (PTPN) untuk melatih atau mengajarkan cara-cara melakukan budidaya sawit yang benar. Model ini tentu dapat menjawab permasalahan seperti ketidak pastian perolehan pendapatan bagi masyarakat penerima bantuan sawit dari awal persiapan penanaman sampai masa panen awal dalam model pemberdayaan secara parsial program pemberian bantuan sawit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, model integrasi sawit-sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa di Aceh Timur dapat dikategorikan ke dalam tiga model yaitu; integrasi secara alami tanpa pengetahuan dan teknologi modern, integrasi melalui kerjasama peternak sapi dengan petani sawit dan integrasi sapi secara intensif. Model integrasi ini dilakukan atas inisiatif petani sendiri tanpa bantuan pemerintah, baik sawit maupun sapi, dan atas bantuan pemerintah, di mana sawit dan sapi merupakan bantuan pemerintah atau salah satunya adalah bantuan pemerintah.

Selanjutnya model integrasi komoditas dan institusi tidak saja dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga telah memberikan peluang yang luas bagi petani untuk melakukan kegiatan sosial, dan bahkan telah berdampak positif terhadap pelaksanaan ibadah shalat petani/peternak, sehingga mereka memperoleh kedamaian spiritual (ini merupakan *novelty* kajian ini), karena ternyata integrasi tersebut telah berdampak positif terhadap pembangunan spiritual, disamping pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan kualitas hidup yang lebih baik yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, model integrasi ini dipandang pantas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahreïn, S. 2010. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 8 No. 2. PP 133-149.
- Chairi, B. 2014. *Perkebunan Terintegrasi Solusi Swasembada Daging Sapi*. [Internet]. [Diakses Tanggal 15 Agustus 2017]. Diunduh Pada <http://www.nasiona-lisme.co/perkebunan-terintegrasi-solusi-swasembada-daging-sapi>.
- Chaniago, T. 2009. *Prespektif Pengembangan Ternak Sapi di Kawasan Perkebunan Sawit*. Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak-Tanaman:Padi, Sawit, Kakao. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2009. Kebijakan Pengembangan Sapi Potong di Indonesia. Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak-Tanaman : Padi, Sawit, Kakao. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Diwyanto, K.D. Sitompul, I. Manti, I.W. Mathius, dan Soentoro. 2004. Pengkajian pengembangan usaha sistem integrasi kelapa sawit-sapi. PP. 11-22. *Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Bengkulu 9-10 September 2003*. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrical.
- Diwyanto K dan Handiwirawan E. 2004. Peran litbang dalam mendukung usaha agribisnis pola integrasi tanaman-ternak. *Prosiding Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dan Crop-Animal. Systems Research Network (CASREN)*. PP. 63–80.
- Erwin, et al. 2009. *Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim*. Semiloka.
- Gabdo, B.H & Abdlatif, I B. 2013, Analysis of The Benefits of Livestock to Oil Palm In An Integrated System: Evidence From Selected Districts In Johor, Malaysia, *Journal Of Agricultural Science*; Vol. 5, No. 12, 2013, PP 145-153.
- Handaka, A. Hendriadi, dan T. Alamsyah. 2009. Perspektif Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Sistem Integrasi Ternak – Tanaman Berbasis Sawit, Padi, dan Kakao. *Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak – Tanaman: Padi, Sawit, Kakao*. (In Press). Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Hutomo MY, 2009, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi. [Internet]. [Diakses Tanggal 15 Agustus 2017]. Diunduh Pada <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-20-tahun-000/pemberdayaan-masyarakat-dalam-bidang-ekonomi-oleh-administrasi-publik-student-journal.ub.ac.id/index>.
- Ismail, Dahlan & Wahab, K H Abdul, 2014, Sustainability Of Cattle-Crop Plantations Integrated Production Systems In Malaysia *International Journal Of Development And Sustainability*. Vol. 3, No. 2, 2014, PP 92-101.
- Iwantoro, Syukur. 2014. *Potensi Jumlah Sapi di Kebun Sawit Capai 1,5 Juta Ekor*. [Internet]. [Diakses Tanggal 25 Juli 2017]. Diunduh Pada <http://sawitindonesia.com/sajian-utama>.
- Latif, Jusoh & Mamat, Mohd Noor. 2002. A Financial Study of Cattle Integration in Oil Palm Plantations. *Oil Palm Industry Economic Journal*. Vol. 2, No.4, 2002, PP 34-44.
- Manti, I., Azmi, E. Priyotomo, dan D. Sitompul. 2004. Kajian sosial ekonomi sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. hlm. 245-260. Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Bengkulu 9-10 September 2003. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agrical.
- Mawardati. 2010. *Penggunaan Faktor Produksi Dan Penerapan Teknologi Serta Kaitannya Dengan Pemilihan Saluran Pemasaran (Suatu Kasus Pada Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Muhammad Syukri Hastuti akhmadi kartawijaya asepe kurniawan. 2014. studi kualitatif proliferasi & integrasi program pemberdayaan masyarakat di jawa tengah, nusa tenggara barat, dan sulawesi selatan, lembaga penelitian semeru jakarta september 2013.
- Nursantri, H et al. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *The Expansion of Palm Oil Plantation and Changes of Rural Social Ecology* vol 4 no 3 Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. PP 249-256. [Internet]. [Diakses Tanggal 14 Oktober 2017]. Diunduh Pada <http://www.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/14434/10702>.
- Purnaningsih, N. 2008. Model pengembangan kelembagaan kemitraan dan pemasaran temulawak di kota semarang. *Sodality: Journal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 2 No. 3 PP 361-371. [Internet]. [Diakses Tanggal 10 Oktober 2017]. Diunduh Pada <http://www.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5875/4540>.
- Rahayu, B.A. 2006. *Pembangunan Perekonomian Nasionalmelalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandar Institute.
- Rasali Hakim Matondang dan Ctalib. 2015. Model Pengembangan Sapi Bali dalam Usaha Integrasi di Perkebunan Kelapa Sawit. *Wartazoa*. Vol. 25, No. 3, 2015, PP 147-157.
- Rengi, Pareng & Fitri, Marnis. 2017. Beef Production Integration And Development Of Palm Oil In Rokan Hilir. *International Journal Of Applied Business And Economic Research*, Vol. 15, No. 8. 2017, PP 184-192.
- Ritzer, George, Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Riyanto. 2007 . Prospek Pengembangan Integrasi Peternakan Dan Perkebunan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Nasional Optimalisasi Hasil Samping Perkebunan Sawit Dan Industri Olahannya Untuk Pakan Temak, Tanah Grogot, 19 Juli 2007 . 5 Him.
- Saifuddin. 2014. Analisis Sosiologis Terhadap Permasalahan Agraria Di Aceh. *Jurnal Suwa*. Vol.12 No.3. Desember 2014. Hal 283-293
- Saifuddin, Suadi, Muhammad Abubakar dan Fadli. 2015. *Kebijakan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui Komoditi Sawit di Kabupaten Aceh Timur*. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Saifuddin, Suadi, Muhammad Abubakar Dan Fadli. 2015. The Local Economic Empowerment Ofthe Ex- Gam (Gerakan Aceh Merdeka/Free Aceh Movement Former Combatant) And Conflict Victims Through Palm Oil Plantation Aid Program In East Aceh, *Internatonal Journal Of Humanities And Soscial Science*, Vol. 5, No. 10. PP 119-124.
- Saifuddin, Suadi, Suryadi, dan Fadli, 2017. Development Startegy of Oil Palm Farmer' Revenue. *Journal of Applied Management (JAM)*. Vol. 15, No 2, 2017 PP 238-244.
- Setiadi, EM dan Kolip, U. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*: hal 377 Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sismudjito. 2016. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Petani Di

Perkebunan Inti Rakyat: Studi Kasus Di Kisaran, Sumatera Utara. *Socio-Economic Empowerment Of Farmers On Large Scale Plantation: Case Study In Kisaran Subdistrict, North Of Sumatra* Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , PP 61-69 Vol 4 No 1. [Internet]. [Diakses Tanggal 10 Oktober 2017]. Diunduh Pada [http://www. Journal.Ipb. Ac.Id/ Index.Php/Sodality/Article/View/14407/10687](http://www.Journal.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Sodality/Article/View/14407/10687).

- Soedjana, T.D. 2008. *Peningkatan Produk Peternakan Untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat. Dalam Budidaya Ternak Ruminansia. Edisi 1*. Direktorat Budi-Daya Ternak Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Solita Sarwono. 2004. *Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep beserta Alikasinya*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sudarya, D. 2007. Implementasi Program Pengembangan Integrasi Sawit-Sapi Di Kalimantan Timur . Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Optimalisasi Hasil Samping Perkebunan Sawit Dan Industri Olahannya Untuk Pakan Ternak, Tanah11 Him.
- Sumidiningrat, G .1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 12, PP. 7-11.
- Syahza, Almasdi. 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau. PPD & I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Jakarta. *Jurnal Ekonomi*. Vol. X. No. 03, 2005. PP 168-177.
- Widardi, G. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press. Yogyakarta.